

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Bapenda Kabupaten Seluma telah melakukan berbagai strategi optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, seperti penguatan administrasi perpajakan, digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, sosialisasi perpajakan, serta penguatan koordinasi dengan UPTD Samsat, Kepolisian, PT Jasa Raharja, dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Strategi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas penerimaan Opsen PKB dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seluma.

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, optimalisasi penerimaan Opsen PKB tersebut telah sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, dan musyawarah. Oleh karena itu, pengelolaan Opsen PKB tidak hanya memiliki nilai administratif dan ekonomis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan *maqashid al-syariah*.

B. Saran

Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Seluma, disarankan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui pengembangan sistem digital yang lebih efektif, peningkatan akurasi data kendaraan bermotor, serta memperluas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen PKB. Selain itu, perlu

dilakukan penguatan pengawasan dan evaluasi secara berkala guna meminimalkan potensi kehilangan penerimaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Bagi Pemerintah Kabupaten Seluma, disarankan untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, UPTD Samsat, Kepolisian, PT Jasa Raharja, serta instansi terkait lainnya agar pengelolaan dan pemungutan Opsen PKB dapat berjalan lebih optimal. Dukungan kebijakan, sarana, dan prasarana pelayanan juga perlu ditingkatkan guna mendukung efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Bagi masyarakat sebagai wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu. Kepatuhan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, baik dari aspek hukum, ekonomi, administrasi publik, maupun kebijakan fiskal daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas implementasi Opsen PKB setelah beberapa tahun pelaksanaannya serta kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Adam, A., Nurhayati, L., & Bahri, S. (2023). Peran Bapenda dalam optimalisasi pendapatan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 112–120.
- Adam, C., Said, M., & Chahyono, C. (2024). Analisis strategi peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPT pendapatan wilayah Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business and Management*, 6(2), 227. <https://doi.org/10.35965/jbm.v6i2.4416>
- Adam, S. I., Putra, E. Y., Moedjahedy, J., & Pungus, S. R. (2023). Aplikasi mobile pengingat pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *CogITO Smart Journal*, 9(1), 218–227. <https://doi.org/10.31154/cogito.v9i1.441.218-227>
- Adeyemo, L. K., & Bakrin, S. F. (2018). The obligation of establishment of governance and civilian-non theocratic nature of government in Islam. *International Journal of Umranic Studies*. <https://www.unissa.edu.bn/journal/index.php/ijus/article/view/39>
- Adnyani, & Anggara, W. A. (2023). Optimalisasi pajak kendaraan bermotor dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 1–12.
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. *Amnesty Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Aidi Muksin, S.Sos.I., M.Ag. (2026). Wawancara sebagai Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma.
- Akbar, A., dkk. (2022). *Distribusi keuangan publik dan masalah*. UB Press.
- Akbar, Y. M., Zainal, R., Novian, N., & Martín, M. (2022). Monetary and fiscal policy mix on the economy: Sharia perspective in literature review. *Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference*. <https://doi.org/10.4108/eai.11-10-2021.2319550>
- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2006). *Developing alternative frameworks for explaining tax compliance*. Georgia State University.
- Al-Mawardi. (2015). *Al-Ahkam al-sulthaniyyah* (K. Fath & Fathurrahman, Penerj.). Qisthi Press.
- Amijaya, R. N. F., & Sholikhin, M. Y. (2022). Analisis perubahan kebijakan pajak di negara GCC dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal BAABU AL-ILMI Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 188. <https://doi.org/10.29300/ba.v7i2.8033>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Apriliyanti, A., dkk. (2021). Akuntabilitas pengelolaan pajak daerah di era digital. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 88–96.
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan layanan SAMSAT keliling pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>

- Arief, M. Z. (2025). Tantangan, implikasi, dan strategi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat terhadap kapasitas fiskal daerah. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(9), 7175. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i9.32507>
- Arif Hidayatullah, S.E., M.M. (2026). Wawancara sebagai Kepala UPTD Samsat Kabupaten Seluma.
- Arif, F. M. (2019). Anggaran belanja daerah berbasis maqasid al syari'ah: Analisis realisasi anggaran Kota Palopo. *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 51–74. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i1.51-74>
- Ariyanatha, & Suardana. (2019). Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Sistem Informasi Publik*, 2(1), 23–34.
- Ariyanatha, I. G. N., & Suardana, K. A. (2019). Peran pendidikan dan pelatihan dalam memoderasi pengaruh sistem komputerisasi dan kompetensi pengguna pada kinerja SIA. *Buletin Studi Ekonomi*, 24(1), 118. <https://doi.org/10.24843/bse.2019.v24.i01.p08>
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Bedir. (2020). *Fiqh siyasah dan pengelolaan keuangan publik*. Kitab House.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). *Tax policy in emerging countries*. Cambridge University Press.
- Christian, & Aribowo. (2021). *Sistem informasi perpajakan untuk daerah*. Media Informatika.
- Christian, F. F., & Aribowo, I. (2021). Pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak strategis di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 102. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1320>
- Davey, K. (1988). *Financing regional government*. Praeger Publishers.
- Deddy Ramdhani, S.E., M.S.E., M.A. (2026). Wawancara sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
- Desmi Fitri. (2022). *Penerapan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kaur perspektif siyasah dusturiyah* (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Dewi, P. (2019). Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*, 3(2), 45–57.
- Djazuli, A. (2017). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Kencana.
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Kencana.
- Efrinaldi. (2021). *Fiqh siyasah dan tata kelola pemerintahan Islam*. Rajawali Pers.
- Erdi, M., & Astuti, R. (2023). Masalah mursalah dalam pengelolaan pajak daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(1), 112–120.
- Fischer. (1992). *Fischer model of tax compliance*. Academic Press.
- Gaol, D. L., Purwoko, A., & Revida, E. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan. *Journal on Education*, 5(4), 11083. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2033>
- Gaol, dkk. (2023). *Optimalisasi pajak kendaraan bermotor*. Mitra Wacana Media.
- Gaol, dkk. (2023). *Peran teknologi informasi dalam administrasi pajak*. Penerbit Digital Tax.
- Hafidhuddin, D. (2019). *Ekonomi dan keuangan publik Islam*. Gema Insani.
- Halim, A. (2021). *Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.

- Haryadi. (2024). Optimalisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan PAD daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 30–38.
- Haryanto, & Lingga. (2024). *Implementasi aplikasi E-Samsat untuk peningkatan kepatuhan pajak*. Penerbit Akuntansi Modern.
- Haryanto, D. A., & Lingga, I. S. (2024). Pengaruh penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 7(1), 28. <https://doi.org/10.34128/jra.v7i1.181>
- Haryanto, D., & Lingga, T. (2024). Analisis kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 9(1), 21–35.
- Herman Suryadi, S.E., M.E. (2026). Wawancara sebagai Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma.
- Indriyanti, S., Putri, R., & Zainal, A. (2023). Stabilitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD. *Jurnal Keuangan Publik*, 14(2), 88–96.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Irwandi, H., S.Ag., M.A. (2026). Wawancara sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma.
- Islahuddin. (2023). *Administrasi pajak daerah dalam fiqh siyasah*. Pustaka Setia.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqih siyasah dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadis. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(1), 18–29.
- Kaho, J. R. (2018). *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Khallaf, A. W. (2015). *Fiqh siyasah: Pengaturan perundangan untuk kemaslahatan*. Dar al-Fikr.
- Khristiana, Y., & Pramesthi, E. G. (2020). Peran sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuisisi Jurnal Akuntansi*, 16(2), 76. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i2.491>
- Kiki. (2026). Wawancara sebagai Operator Samsat Kabupaten Seluma.
- Kurnia Rahayu, S. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Laila, S., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh layanan Samsat corner, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 630. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p11>
- M, N. S. (2019). Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 37. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i1.6500>
- Mahmudi. (2016). *Manajemen keuangan daerah*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi Publisher.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi.
- Marihot P. Siahaan. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. RajaGrafindo Persada.
- Meifari. (2020). *Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pajak*. Pustaka Akuntansi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.

- Moore, M. (2007). How does taxation affect the quality of governance? *IDS Working Paper*, 28(4), 1–28.
- Moore, M. (2007). *Public sector governance*. Cambridge University Press.
- Muktarul Yasir. (2026). Wawancara sebagai Imam Masjid di Kabupaten Seluma.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance*. McGraw-Hill.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.
- Nayaka, & Darma. (2020). *Hambatan implementasi sistem digital pajak di daerah*. Penerbit Pajak Nusantara.
- Nodi Erwansyah, H., M.Pd.I. (2026). Wawancara sebagai Ketua MUI Kabupaten Seluma dan Imam Besar Masjid Agung Baitul Falihin.
- Novita, dkk. (2025). Evaluasi layanan E-Samsat di Kabupaten Seluma. Diakses dari <https://ejournal.samsatdigital.id/evaluasi>
- Nur Rohim Yunus. (2022). *Fiqh siyasah kontemporer*. Rajawali Pers.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Oka Suhendra. (2026). Wawancara sebagai Operator Samsat Kabupaten Seluma.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government*. Addison-Wesley.
- Pandiangan, L. (2020). *Manajemen pajak daerah*. Mitra Wacana Media.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2024). *Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor dan bentuk sinergi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor*.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2025). *Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan pajak alat berat*.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2025). *Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2025 tentang mekanisme pemungutan pajak daerah*.
- Permandi. (2012). *Pengelolaan tarif progresif pajak kendaraan bermotor*. Rajawali Pers.
- Pohan, C. A. (2021). *Digitalisasi perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Praviesta, dkk. (2022). *Inovasi layanan publik dan kepatuhan pajak*. Universitas Stikubank Press.
- Pulungan, J. S. (2018). *Fiqh siyasah: Ajaran, sejarah dan pemikiran*. RajaGrafindo Persada.
- Purnawan, dkk. (2024). *Faktor eksternal yang mempengaruhi sistem digital Samsat*. Penerbit Teknologi dan Administrasi.
- Puteri, A., dkk. (2019). Peran penyuluhan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Administrasi Pajak*, 5(2), 45–56.
- Qaradawi, Y. Al. (2016). *Fiqh daulah dalam perspektif Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Qaradawi, Y. Al. (2017). *Fiqh negara*. Pustaka Al-Kautsar.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Rahmat Jumali. (2026). Wawancara sebagai wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Seluma.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Richard, M. B., & Zolt, E. M. (2008). *Technology and taxation in developing countries*. World Bank Publication.
- Rismawan. (2026). Wawancara sebagai Imam Masjid di Kabupaten Seluma.

- Rizal. (2019). Pajak kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 45–53.
- Rizky, M., & Syahputra, A. (2022). Analisis tarif progresif pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 8(2), 112–124.
- Rizky, M., & Syahputra, A. (2022). Konsep pajak daerah dalam otonomi daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 11(3), 301–315.
- Rizky, M., & Syahputra, A. (2022). *Sistem electronic traffic law enforcement dalam pengawasan PKB*. Pustaka Mandiri.
- Rochmat Soemitro. (2019). *Dasar-dasar hukum pajak*. Refika Aditama.
- Rondinelli, D. A. (1993). *Development projects as policy experiments: An adaptive approach to development administration*. Routledge.
- Rumaizha, R., & Pertiwi, G. B. (2022). Analisis kontribusi penerimaan PKB dalam meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Keuangan Daerah*, 15(1), 34–42.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics*. McGraw-Hill.
- Sari, D. (2018). Pengaruh pelayanan publik terhadap kepatuhan pajak daerah.
- Sedarmayanti. (2018). *Good governance dan good corporate governance*. Mandar Maju.
- Sembiring, A., & Sukma, Y. (2023). Kontribusi BUMD terhadap PAD daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5(1), 29–40.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. RajaGrafindo Persada.
- Sodiqin, & Radiamoda. (2021). *Transparansi fiskal di daerah*. Unesa Press.
- Suandy, E. (2016). *Hukum pajak*. Salemba Empat.
- Sugeng Zonrio, S.H. (2026). Wawancara sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Seluma.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartono, & Yeheskiel. (2022). *E-Samsat dan kepatuhan wajib pajak*. Deepublish.
- Suhartono, & Yeheskiel. (2022). *Optimalisasi pajak kendaraan bermotor di Indonesia*. Penerbit Pajak Nusantara.
- Suparman, H., Wibowo, T., & Kurniawati, S. (2019). Perubahan nomenklatur dan penguatan manajemen pendapatan daerah. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 10(1), 40–53.
- Suprianto. (2026). Wawancara sebagai wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Seluma.
- Surbakti. (2011). *Administrasi perpajakan daerah*. Rajawali Pers.
- Syafri, & Alwi. (2022). *Administrasi publik kontemporer*. Refika Aditama.
- Syarif, M. I. (2020). *Siyasah syar'iyah dalam pemerintahan modern*. Pustaka Setia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development*. Pearson.
- Tulungen, dkk. (2024). Pemanfaatan teknologi digital dalam pajak daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 6(1), 55–68.
- Turnip, S., dkk. (2024). Pendekatan sosialisasi pajak yang efektif untuk komunitas lokal. *Jurnal Pajak dan Kebijakan Publik*, 9(1), 88–101.
- Virgiawati. (2019). *Transformasi digital layanan publik di Indonesia*. Media Ilmu.
- Waluyo. (2017). *Pajak dan keadilan sosial dalam perspektif Islam*. Kencana.

- Widyana, P., & Putra, M. (2020). Kelembagaan fiskal dalam kerangka otonomi daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 5(2), 98–110.
- Yulanda, D., Hermanto, B., & Lestari, F. (2024). Pengawasan dan pengendalian pajak daerah. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 7(1), 20–34.
- Yulianis. (2019). *Siyasah dusturiyah: Regulasi pemerintah Islam*. Kencana.
- Yusuf, B. (2018). Politik dalam Islam: Makna, tujuan dan falsafah (Kajian atas konsep era klasik). *Aqidah-Ta Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(1), 114. <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i1.5653>
- Yusup, A. (2023). Kemandirian fiskal daerah dan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(1), 15–27.
- Zakir, A., Rahman, M., & Yusuf, M. (2021). Keadilan dalam kebijakan fiskal perspektif fiqh siyasah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 45–53.
- Zamzami, A., dkk. (2023). Pengaruh edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan*, 8(1), 34–46.
- Zamzami, Z., Dahmiri, D., & Parkhurst, H. (2023). Strategic enhancement of motor vehicle taxation in Jambi Province: A pathway to strengthened regional fiscal autonomy. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 11(4), 297. <https://doi.org/10.22437/ppd.v11i4.24058>
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). Konsep maqashid syariah menurut Al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal. *AL-FALAH Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>
- Zumali. (2026). Wawancara sebagai wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Seluma.
- Zunaidi, A. (2021). Abu Yusuf dan pajak (Konsep dalam kitab Al-Kharaj dan relevansinya dalam ekonomi saat ini). *Fenomena*, 20(1), 45. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>

